

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP)**

**(Studi Kasus pada Kelompok Wanita Cempaka Putih, Sungai
Liku Tengah, Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir,
Kabupaten Pesisir Selatan)**

OLEH

SINTA OKTAVIA
07 115 039



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
(SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
(Studi Kasus pada Kelompok Wanita Cempaka Putih Sungai Liku Tengah
Kenagarian Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan)**

Abstrak

Penelitian mengenai pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), dilaksanakan di Sungai Liku Tengah Kenagarian Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2011. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan keuangan SPP pada Kelompok Wanita Cempaka Putih, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pengembalian dana SPP pada Kelompok Wanita Cempaka Putih serta langkah-langkah yang diupayakan oleh Kelompok Wanita Cempaka Putih untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus. Adapun pengambilan responden dilakukan secara *sensus*, yakni semua peminjam dana SPP yang menunggak dalam pengembalian angsuran pinjaman. Adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui tujuan pertama dan kedua dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana SPP pada kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana belum adanya sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (*peminjam*). Begitupun halnya dengan persoalan yang terjadi pada kelompok pengelola, dimana penunggakan yang terjadi adalah sebesar 70,3 % (26 orang) dari 37 peminjam pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-masing pihak yang harusnya saling menjalankan peranannya serta saling bersinergi tersebut.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2008).

PNPM-MP ini diluncurkan pemerintah guna peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

“Ruang lingkup kegiatan PNPM-MP pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : (1) penyediaan dan perbaikan pasarana atau sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya, (2) penyediaan

sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini, (3) kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia” (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

Terkait dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang pengelolaannya lebih banyak diberikan pada kaum perempuan biasanya disebut juga Simpan Pinjam Perempuan (SPP). SPP sebagai usaha simpan pinjam merupakan suatu program yang diharapkan mampu memecahkan persoalan di tingkat masyarakat, yang pengelolaannya diserahkan kepada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggungjawab pada perekonomian keluarga di pedesaan. Program Simpan Pinjam Perempuan ini dilatar belakangi oleh masalah ataupun persoalan yang dihadapi oleh kelompok. Hal ini terkait persoalan lemahnya perekonomian masyarakat, sumberdaya masyarakat yang minim, semakin meningkatnya kemiskinan, bertambahnya jumlah anak putus sekolah, serta tingginya angka pengangguran (Pengurus Kelompok Cempaka Putih dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir, 2008).

Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana ; mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntungan pun akan kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, biaya sekolah anak, dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Dengan demikian, dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan ini diharapkan adanya perubahan kondisi di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri. Dimana dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan ini di dalam kelompok, diharapkan program Simpan Pinjam Perempuan mampu menjadi alat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin baiknya pendidikan di keluarga petani, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya angka pengangguran, sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran hidup dengan adanya program ini

(Pengurus Kelompok Cempaka Putih dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir, 2008).

Menurut Suparjan (2003) kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami essensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan.

PNPM-MP sebagai salah satu program yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang biasanya pengelolaannya diserahkan pada perempuan melalui kelompok, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat. Untuk tercapainya efektifitas ataupun tujuan dari sebuah kelembagaan maka diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik, begitupun halnya dengan kelompok wanita Cempaka Putih yang juga bergerak dalam simpan pinjam. Terkait SPP perlu adanya manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap dana SPP tersebut sehingga keberlanjutan program bisa tercapai. Hal ini mengingat dimana dalam kegiatan SPP yang menjadi jembatan adalah adanya dana yang akan di simpan ataupun di pinjamkan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program SPP pada kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana belum adanya sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (*user*).
2. Penunggakan yang terjadi pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-masing pihak yang harusnya bersinergi, yakni kelemahan kelompok pemberi dana (dalam hal ini ditekankan pada UPK), kelemahan kelompok pengelola dana, dan kelemahan pengguna dana (*user*) itu sendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk pengelolaan aktifitas simpan pinjam yang lebih baik, perlu adanya sinergi antar stakeholder yang terlibat, yakni sinergi antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (*user*). Dimana akan lebih baik ketika semua pihak yang terlibat memiliki rasa saling memiliki sehingga timbul keinginan untuk saling mensejahterakan.
2. Persoalan penunggakan yang terjadi bisa diatasi ketika adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan baik, sehingga kelemahan yang ada berubah menjadi kekuatan yang akan saling menguatkan satu sama lain. Disamping itu, setiap peran yang ada harapannya tidak lagi sekedar formalitas, namun lebih pada peningkatan dan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Grameen Bank II (Grameen Global System). <http://www.grameenfoundation.org>. [Juli 2011]
- Ardiansyah, Asrori. 2010. *Disiplin dan Sanksi* <http://kabar-pendidikan.blogspot.com>. [11 Agustus 2011]
- Berutu, L. 2004. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) terhadap kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Nanggaluh Kabupaten Aceh Singkil*. [skripsi]. Aceh.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hall, Nicola. 2004. *Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang*. [skripsi]. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. 117 hal.
- Handayani, Rielyan. 2007. *Pemberdayaan Kelembagaan Petani Melalui Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM)*. [skripsi]. Padang. Universitas Andalas. 76 hal
- Hermanto. 2006. *Faktor-Faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang* [skripsi]. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 74 hal. <http://www.smecca.com>. [10 November 2010].
- Hermanto. 2007. *Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan*. Palembang. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan
- Irianto, Y.B. 2007. *Dinamika Kelompok*. Modul 4 Dinamika Kelompok
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Pengurus Kelompok Cempaka Putih dan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir. 2008. Proposal usulan kegiatan SPP Sungai Liku Kabupaten Pesisir Selatan. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA. 2008 Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (PTO PNPM-MP). 2009. Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan.
- PNPM Kabupaten Tana Tidung. 2010. *Sekilas Tentang Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan*. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. <http://akumassa.org>. [8 Oktober 2010].

- P3KBPM-PNPM MP (Pokja Pengendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat-PNPM Mandiri). 2010. *Tentang PNPM*
- Profil Kenagarian Pelangai. 2010. *Dukumen Profil Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan*. Nagari Pelangai : Kantor Walinagari Pelangai.
- Raf. 2008. *Penghargaan*. <http://raf-startwithnothing.blogspot.com> [11 Agustus 2011]
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sofianto, Arif, dkk. 2009. *Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan dan Pengelolaan Keuangan Di Unit Pengelola Kecamatan (UPK)*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. Vol. 7 No.2, Desember 2009
- Suparjan dan Suyatno, H. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta. Social Agency. 212 hal
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2008. *Pedoman umum program nasional PNPM Mandiri*. Sekretariat Tim Pengendali PNPM mandiri. 49 Hal.